

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada skripsi ini penulis akan membahas tentang kebijakan Donald Trump terhadap Huawei, pada tanggal 15 Mei 2019 pemerintah Amerika Serikat melalui presiden Donald Trump mengumumkan status darurat nasional dari ancaman spionase, presiden Donald Trump juga telah menandatangani instruksi presiden untuk melarang perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menggunakan perangkat telekomunikasi yang diproduksi oleh pihak asing yang dianggap Amerika berbahaya bagi keamanan nasionalnya. Dalam hal ini departemen perdagangan Amerika Serikat telah memasukan Huawei ke dalam daftar hitam entitas-entitas yang dinilai berbahaya dan beresiko bagi keamanan nasional AS dan politik luar negeri AS. (Shepardson, 2019)

Departemen Perdagangan Amerika Serikat memasukan Huawei dan 70 afiliasinya ke daftar hitam entitas asing yang mana Amerika Serikat melarang perusahaan yang masuk daftar hitam untuk memperoleh komponen dan teknologi dari perusahaan Amerika Serikat tanpa seizin pemerintah. (Aninda, 2019). Masuknya Huawei dalam daftar hitam Amerika Serikat menjadi sorotan dunia internasional, karena perang dagang bukan lagi soal tarif ekspor impor semata. Amerika Serikat juga telah secara aktif mendorong negara-negara lain untuk tidak menggunakan peralatan perusahaan China dalam jaringan 5G generasi berikutnya yang disebutnya "tidak dapat dipercaya." Pada bulan Agustus, Trump menandatangani undang-undang yang melarang pemerintah AS menggunakan peralatan dari Huawei dan penyedia China lainnya.

Bukan kali ini saja perusahaan teknologi asal China di curigai oleh Amerika Serikat, pada tahun 2012 Komite intelejen di DPR Amerika Serikat mengungkapkan laporan

penyelidikan mereka selama 11 bulan, dalam laporan itu DPR AS menyarankan perusahaan-perusahaan Amerika jangan terlibat bisnis dengan Huawei dan ZTE demi kepentingan keamanan nasional, Amerika menuduh Huawei dan ZTE terlibat dalam spionase yang dilakukan oleh Beijing. Tidak hanya Amerika saja yang mulai melarang perusahaan negaranya untuk berbisnis dengan Huawei, negara-negara sekutu terdekat Amerika juga sudah banyak mengambil langkah yang sama dengan Amerika Serikat lakukan, Kanada sebagai sekutu terdekat Amerika mulai mengambil gelagat untuk tidak berbisnis dengan Huawei, tidak hanya Kanada, Australia juga sudah melarang Huawei untuk mengikuti tender proyek telekomunikasi di Australia. (Kawilarang, 2012)

Huawei Technologies Co. Ltd. adalah perusahaan penyedia perangkat telekomunikasi terbesar di China dan dunia, perusahaan swasta ini didirikan pada tahun 1988 oleh Ren Zhengfi mantan Tentara Pembebasan Rakyat China (TKR), perusahaan Huawei berfokus pada penelitian dan pengembangan (litbang), produksi, pemasaran dan penyedia perangkat-perangkat telekomunikasi seperti pelayanan broad band 4G dan 5G, Aplikasi, Smartphone, Tablet, routers, home internet dan berbagai produk telekomunikasi lainnya.

Menurut laporan *The Economist* pada agustus 2012, Huawei telah menyalip perusahaan raksasa asal Swedia yaitu Ericsson dan Huawei mulai menjelama sebagai perusahaan pembuat perangkat-perangkat telekomunikasi terbesar di dunia dengan penghasilan laba sebesar USD 3,7 Miliar pada 2010, bisnis Huawei juga tersebar di 140 negara dan telah melayani 45 dari 50 operator telekomunikasi dunia, saat ini Huawei memiliki lebih dari 170.000 karyawan dan saham-saham perusahaan Huawei dimiliki oleh para karyawannya, Huawei juga menjadi salah satu perusahaan terdepan yang mengembangkan teknologi 5G.

Di Amerika sendiri Huawei memiliki kantor di Plano Amerika Serikat, bangunan ini berukuran 100.000 square-foot dan menjadi kantor perwakilan Huawei yang berada di Amerika Utara. Huawei juga telah membangun 12 kantor

cabang dan tujuh pusat R&D di AS, termasuk pusat penelitian di Santa Clara, California, dan sekarang mempekerjakan lebih dari 1100 orang di AS dan 75% dari mereka adalah orang AS dan 200 lainnya berasal dari China. Huawei mempunyai infrastruktur yang kuat untuk menjadi pemain utama dalam bidang Telkom di AS. Huawei juga memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan AS dalam bidang pedoman manajemen dan bisnis, persetujuan supplier, dan perseketuan tehnologi. Huawei juga menjalankan empat pusat R&D di AS dan memiliki rekam kolaborasi tehnologi yang kuat dengan NEC, dan pada tahun 2003 NEC dan Huawei membuka 3G Mobile Internet Open Lab di Shanghai untuk memproduksi tehnologi 3G baru (Huawei, 2002).

Selain memberikan pelayanan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Huawei juga membuat smartphone dan telah menghabiskan milyaran dolar untuk memproduksi device atau alat-alat yang bias bersaing mendapatkan market share dengan perusahaan telekomunikasi internasional lainnya. Ekspansi Huawei pada penjualan smartphone meperuntukan kesempatan untuk perusahaan AS seperti Cricket, low-cost, regional telecommunications carrier yang menikmati keberhasilan penjualan smartphone Huawei, dan Google yang system operasi androidnya dipakai di Smartphone dan Tablet Huawei (The Wall Street Journal, 2012). Huawei berkembang pesat di AS dengan keuntungan hingga USD 1.3 miliar pada tahun 2011, meningkat dari pada tahun 2010 yang hanya USD 760 juta. Keuntungan itu datang dari meningkatnya penjualan smartphone dan computer tablet Huawei (Viva, 2012)

Bisnis Huawei di AS semakin meningkat dengan adanya salah satu konsumen penting Huawei yaitu Leap, sebuah pengembangan perusahaan dari Qualcomm yang mengang perusahaan Cricket sebagai operator wireless ketujuh di AS. Konsumen besar lainnya adalah Clearwire, sebuah perusahaan penyedia internet wireless, yang sebagian dimiliki oleh Sprint. Clearwire melakukan partnership deal untuk menyuplai tehnologi 4G untuk Sprint. Kini Huawei akan focus pada tehnologi cloud computing dan enterprise space, yang akan

berkompetisi dengan Oracle, Avaya, Hawleet-Packard, Cisco, dan Amazon (Fortune, 2011).

Pada tahun 2012 Huawei telah megoperasikan tujuh pusat R&D di AS, Huawei menarik beberapa orang cerdas dan insinyur-insiyur berpengalaman, peneliti dan ilmuwan dari AS, yang sangat bersemangat dalam hal inovasi. Huawei menginvestasikan jutaan dolar dalam proyek penelitian dan kerjasama dengan berbagai institusi Pendidikan tinggi yang ada di AS setiap tahunnya. Investasi R&D Huawei di AS meningkat 15 kali lipat yang dari \$16 juta menjadi \$230 juta pada tahun 2011. Dari 14 fasilitas R&D yang dioperasikan telah memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi daerah local dan negara, dan 75% dari pekerja yang ada adalah warga AS sendiri, termasuk para pemimpin teknisi utama, senior manajer dan eksekutif (Huawei, 2012).

Dengan adanya Huawei di AS secara tidak langsung membuat kompetisi di AS menjadi lebih ketat, adanya banyak pusat R&D yang didirikan di AS juga membantu AS dalam pengembangan tehnologi karena 75% pekerjanya adalah warga AS sendiri, namun kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah AS melalui Donald Trump yang memasukan Huawei dalam daftar hitam perdagangan membuat dunia internasional terkejut, karena Huawei adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia untuk saat ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas tentang alasan proteksionisme AS terhadap Huawei pada masa pemerintahan Donald Trump.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan diatas, rumusan masalah yang penulis ajukan adalah mengapa Amerika Serikat Pada Pemerintahan Donald Trump melakukan upaya pelarangan penggunaan produk-produk dari Huawei dan melarang perusahaan-perusahaan AS bekerjasama dengan Huawei?

C. Kerangka Dasar Teori

Berdasarkan latar belakang masalah, kerangka dasar Teoritik yang akan penulis pergunakan dalam penelitian ini

adalah teori pengambilan kebijakan luar negeri model William D. Coplin

Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Model William D. Coplin

Untuk menjelaskan kebijakan yang diambil oleh pemerintah AS dalam upaya pelarangan Huawei di AS pada masa pemerintahan Donald Trump, penulis akan menggunakan teori kebijakan luar negeri model William D. Coplin. Dalam bukunya Wiliam D. Coplin menyatakan:

“Dalam menganalisa mengapa suatu negara mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri atau menentukan sikap, maka kita harus mempertanyakan mengapa para pemimpin dari suatu negara itu membuat keputusan. Akan salah besar jika kita beranggapan bahwa dalam pembuatan kebijakan/keputusan luar negeri para pemimpin tidak memiliki pertimbangan atau bertindak sembarangan. Melainkan sebaliknya, tindakan yang diambil oleh pembuat kebijakan itu merupakan hasil akumulasi dari berbagai konsiderasi yang mempengaruhi mereka.” (Coplin, 2003)

Dalam pernyataan tersebut telah disebutkan bahwa dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, para pembuat kebijakan sangat memikirkan dan mempertimbangkan berbagai konsiderasi yang ada. Wiliam D. Coplin menyatakan ada tiga konsideran yang sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri. Konsideran tersebut adalah Kondisi Politik Dalam Negeri, Situasi/Kemampuan Ekonomi dan Militer serta Konteks International (Coplin, 2003). Penjelasan singkatnya sebagai berikut:

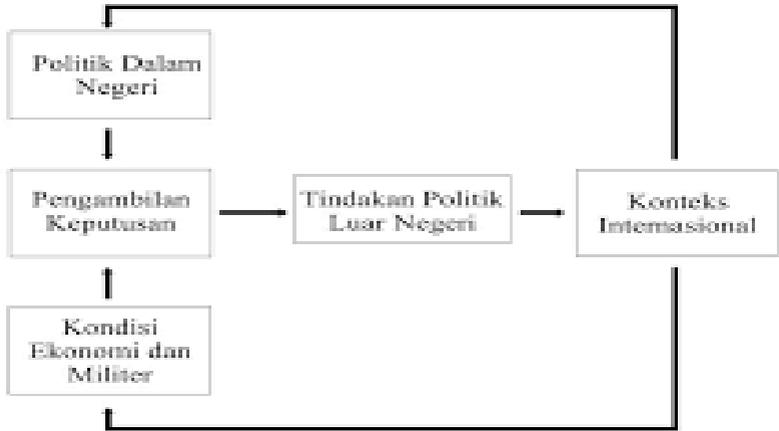
1. **Politik Dalam Negeri** merupakan kondisi yang sedang atau telah berlangsung didalam suatu negara yang selanjutnya bisa dijadikan sebagai sebuah pertimbangan oleh para pembuat kebijakan. Termasuk juga mengenai sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara (Coplin, 2003).
2. **Situasi Ekonomi dan Militer** sering disebut sebagai kekuatan atau pontesi yang ada dalam suatu negara dan merupakan salah satu konsideran penting dalam

merumuskan tindakan politik luar negeri. Negara harus mampu atau memiliki kesedian untuk menciptakan kondisi yang diperlukan sebagai penopang politik luar negerinya baik itu dari ekonomi maupun militer atau kemanan (Coplin, 2003).

3. **Konteks Internasional** merupakan situasi politik maupun situasi-situasi lain diluar negara tersebut dimana akan mendorong diambilnya sebuah sikap atau kebijakan luar negeri oleh negara itu sendiri. Konteks international juga merupakan situasi atau kondisi yang harus dihadapi atau dicegah dan harus diantisipasi oleh sebuah negara dimasa ini maupun dimasa mendatang (Coplin, 2003).

Dalam bukunya William D. Coplin membuat sebuah skema. Skema ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam perjalanan pengambilan kebijakan luar negeri dan juga berguna untuk menjelaskan ketiga konsideran yang dijelaskan diatas saling berinteraksi sampai diambilnya kebijakan luar negeri oleh sebuah negara. Skema yang dikemukakan adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1 Skema teori pengambilan Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin



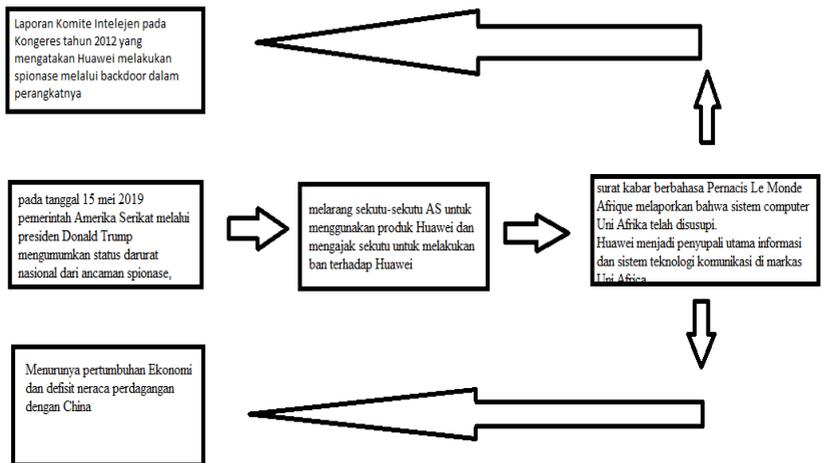
Sumber: William D. Coplin dan Marsedes Marbun,
 Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis,
 (edisi kedua, tahun 2003).

Berdasarkan skema diatas, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan sebuah keputusan yang didapatkan dari beberapa proses yang saling menghubungkan antar konsideran yang ada. Pengambilan suatu Kebijakan luar negeri didahului dengan adanya tuntutan dan dorongan dari politik dalam negeri sebuah negara. Disamping itu, kekuatan dan kemampuan dalam bidang ekonomi dan militer juga menjadi pertimbangan dalam menghadapi sebuah isu. Kemudian kedua consider ini akan masuk dan menjadi pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk diproses.

Selain itu ada konteks internasional yang juga memberi pengaruh cukup kuat terhadap tuntutan maupun dukungan kepada para pengambil kebijakan didalam sebuah negara itu sendiri. Kemudian konsideran dan pertimbangan tadi diproses dan dianalisa oleh para pembuat keputusan dan akan menghasilkan sebuah kebijakan luar negeri.

Poin penting yang perlu ditekankan oleh penulis bahwa sebelum pemerintahan Donald Trump, Huawei sudah diterpa oleh isu yang bisa mengancam keamanan AS, namun

pemerintah sebelumnya tidak mengambil kebijakan yang signifikan untuk melarang Huawei, namun dimasa pemerintahan Donald Trump, kebijakan yang diambil sangatlah signifikan dengan dideklarasikanya kondisi darurat nasional di sector teknologi melalui sebuah perintah eksekutif, bersama dengan kebijakan ini, Huawei dan 68 entitas yang terafiliasi deng Huawei dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan yang dilarang membeli perangkat dan komponen dari perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah. Oleh karena itu, penulis akan melakukan aplikasi teori secara sederhana dengan kasus Proteksionisme AS terhadap Huawei pada masa pemerintahan Donald Trump. Penjelasan aplikasi sederhanya sebagai berikut:



Kondisi Politik Dalam Negeri

Pada tahun 2012 Komite intelejen di DPR Amerika Serikat mengungkapkan laporan penyelidikan mereka selama 11 bulan, dalam laporan itu DPR AS menyarankan perusahaan-perusahaan Amerika jangan terlibat bisnis dengan Huawei dan ZTE demi kepentingan keamanan nasional. kata komite penyelidik dalam laporan mereka “Cina memiliki alat, kesempatan dan motif untuk menggunakan kedua perusahaan

telekomunikasi itu untuk tujuan-tujuan jahat” namun ditahun itu pemerintah AS hanya menghimbau perusahaan-perusahaan AS untuk tidak menggunakan produk-produk dari Huawei, Isu ini membuat masyarakat AS menjadi khawatir akan produk-produk dari Huawei isu keamanan ini kemudian menjadi lebih besar saat AS dipimpin oleh Donald Trump, pemerintah AS pada masa pemerintahan Donald Trump telah melarang pemerintah AS memakai produk apapun buatan Huawei setelah mendapat peringatan dari CIA (Kristo, 2018).

Situasi Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah salah satu pertimbangan AS dalam mengambil kebijakan ini. Pada tahun 2018 AS mengalami defisit perdagangan sebesar USD 891 miliar dan menjadi rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir dan defisit perdagangan barang dengan China mengalami peningkatan sebesar 11,6% yaitu USD 419,2 miliar dan menjadikan defisit perdangan barang dengan China ke level tertinggi sepanjang masa. Faktor ini juga mengakibatkan perang dagang antara AS dan China dengan kenaikan tariff yang diambil oleh AS dan dibalas oleh China. Faktor ekonomi yang defisit ini juga menjadi alasan Donald Trump dalam mengambil kebijakan terhadap Huawei, namun banyak pejabat AS yang mengatakan bahwa langkah keras yang diambil AS terhadap Huawei murni didasari oleh dasar keamanan nasional dan tidaklah berkaitan dengan perang dagang yang tengah berkecamuk antar kedua negara. Namun nyatanya Trump menepis hal tersebut, pada pertengahan bulan agustus 2019 Trumo mengatakan “AS tidak akan berbisnis dengan Huawei. Namun, itu bisa berubah jika ada kesepakatan dagang AS-China” (Kristo, 2018).

Pada bulan januari 2018, surat kabar berbahasa Pernacis Le Monde Afrique melaporkan bahwa sistem computer Uni Afrika telah disusupi. Surat kabar tersebut mengutip sejumlah sumber dan mengatakan selama lima tahun, setiap malam antara tengah malam hingga pukul 2 dini hari, data dari server Uni Africa ditransfer ke server di kota yang berjarak 8000 KM dari Addis Abbab. Ditegah itu semua,

sebuah fakta bahwa Huawei menjadi penyuplai utama informasi dan sistem teknologi komunikasi di markas Uni Africa. Menurut Danielle Cave, pengamat senior Australian Strategic Policy Institute sulit untuk tidak melihat Huawei yang berperan sebagai penyedia perangkat sekaligus penyedia kunci layanan informasi dan sistem teknologi komunikasi markas AU, khususnya bagi pusat data AU benar-benar tidak tahu menahu soal pencurian data besar-besaran yang sangat kentara, setiap hari, selama lima tahun. Berita ini juga menimbulkan kecurigaan bertahun-tahun terhadap Huawei yang sangat dipengaruhi oleh pemerintah China. AS, Jerman, dan Kanada juga sedang mengkaji produk Huawei apakah mengandung ancaman keamanan (Vaswani, 2019).

Australia mengambil langkah terdepan dengan melarang penyedia perangkat manapun yang kemungkinan bisa menjadi subjek yang dikendalikan secara ekstrajudisial oleh pemerintah asing. Ini menjadi pertimbangan AS dalam mengambil kebijakan mereka terhadap Huawei.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka dasar teori pengambilan keputusan luar negeri yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan hipotesa dari faktor-faktor yang mendorong proteksionisme AS terhadap Huawei pada masa pemerintahan Donald Trump adalah sebagai berikut:

Adanya dorongan dari dalam negeri dan untuk menjaga keamanan nasional AS, defisit perdagangan yang terjadi terutama dengan China dan laporan-laporan luar negeri mengenai isu keamanan Huawei membuat AS mengambil kebijakan untuk melarang Huawei berbisnis di AS

E. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan pemerintah AS melakukan proteksinisme kepada Huawei pada masa pemerintahan Donald Trump. Kemajuan luar biasa Huawei dalam bisnis telekomunikasi dunia menjadi sebuah ancaman besar bagi perusahaan-perusahaan AS yang bergerak dibidang yang sama, apalagi dengan kemunculan teknologi 5G yang

diprakasi oleh Huawei. Hal ini menjadi kekhawtiran AS terhadap kepentingan ekonomi domestik maupun internasional AS. Dengan mengeluarkan pernyataan tuduhan kepada Huawei yang telah melakukan kegiatan spionase di AS menjadi cara AS menahan kemajuan bisnis Huawei di AS.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan ini, penulis menggunakan jangka waktu dari tahun 2012 hingga 2019. Dimana pada tahun 2012 Komite intelejen di DPR AS mengungkapkan laporan penyelidikan mereka selama 11 bulan, dalam laporan itu DPR AS menyarankan perusahaan-perusahaan Amerika jangan terlibat bisnis dengan Huawei demi kepentingan keamanan nasional AS.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memeberikan paparan menyeluruh tentang alasan dibalik AS menghalangi bisnis Huawei di AS, data-data diperoleh dari studi Kepustakaan melalui buku-buku, jurnal dan berita-berita baik dari media elektronik maupun cetak yang memiliki relevansi dengan masalah yang sedang dikaji, penulis juga melakukan komparasi dengan menganalisa data yang diperoleh dan membandingkan antara satu dan yang lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima

BAB I: Bagian ini merupakan pendahuluan dari skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: Bagian ini menjelaskan perusahaan Huawei baik dari sejarah berdirinya dan kerjasama bisnis Huawei dengan AS

BAB III: Bagian ini menjelaskan tentang penerapan kebijakan pelarangan terhadap perusahaan Huawei yang dilakukan oleh presiden Donald Trump

BAB IV: Bagian ini menjelaskan tentang alasan kebijakan pelarangan terhadap perusahaan Huawei yang dilakukan oleh presiden Donald Trump

BAB V: Bagian ini berisi kesimpulan dari penelitian skripsi ini